OPERASI KNALPOT TERUS DIGENCARKAN

Peserta Kampanye Hindari Knalpot Brong

KR-Judiman

Peserta kampanye pengguna knalpot brong terjaring operasi.

BANTUL (KR) - Polres Bantul terus melakukan tindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak standar atau brong. Termasuk pengguna sepeda motor yang mengikuti kampanye metode rapat umum.

"Kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang kedapatan menggunakan knalpot brong, ditindak saat kegiatan Gatur pagi dan sore. Tidak ada toleransi untuk kendaraan berknalpot brong," tegas Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana.

Hingga Minggu (21/1) total ada 830 knalpot brong yang diamankan petugas Polres Bantul. Langkah dan upaya yang terus dilakukan, semata-mata untuk memerangi penggunaan knalpot tidak standar atau brong yang didominasi kendaraan sepeda motor.

Selain itu, banyak keluhan dan laporan dari masyarakat kepada polisi mengenai ketidaknyamanan gegara bunyi knalpot brong. "Memang untuk penanganan knalpot brong, menjadi atensi dari Kapolda, kami tidak bosan-bosannya terus mengimbau agar tidak ada lagi kasus ini," ucap Jeffry.

Dampak dari penggunaan knalpot brong, akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Polres Bantul tidak bosan-bosannya mengingatkan dan menegaskan larangan penggunaan knalpot brong. "Memang tidak menjadi faktor utama terjadi kecelakaan, namun dapat menjadi pemicu terjadinya gesekan di masyarakat," terang Jeffry.

Selain itu, knalpot brong juga dapat menyebabkan polusi udara, polusi suara, serta dapat meningkatkan emisi gas buang. Larangan knalpot brong ini tertuang di UU No 22 Tahun 2002 tentang Lalulintas Angkutan Jalan, Pasal 285 dan Pasal 106.

"Pelaku dapat dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu," tandas Jeffry. **(Jdm)-f**

Bawaslu Lantik 3.166 Pengawas TPS Pemilu 2024

BANTUL (KR) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul melalui panitia pengawas tingkat kecamatan (panwascam) melantik sebanyak 3.166 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) yang akan bertugas melakukan pengawasan pada Pemilu 2024.

"Pelantikan dilakukan secara serentak pada 22 Januari, dan kemudian dilanjutkan dengan pembekalan kepada para pengawas TPS terlantik," jelas Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Bantul, Sri Hartati, Selasa (23/1).

Pelantikan di masing-masing kecamatan dengan disaksikan Camat, Kapolsek dan Danramil setempat itu diawali dengan pengucapan sumpah janji yang dipandu Ketua Panwascam dan dilanjutkan pembacaan pakta integritas oleh masing-masing pengawas TPS.

"Pengawas TPS pada Pemilu 2024 yang dilantik ini merupakan hasil seleksi yang dilakukan di masing-masing kecamatan, baik dari selesai administrasi maupun seleksi wawancara oleh Panwascam," jelasnya.

Selanjutnya pengawas TPS ini akan dibekali dengan pengetahuan tentang tugas, kewajiban dan kewenangan pengawas pada Pemilu 2024. Selain itu pengawas TPS juga diberikan bekal tentang kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

"Pembekalan pengawas TPS akan dilakukan dua kali. Pembekalan kedua ditekankan pada penguatan pemahaman tentang regulasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi sistem pengawasan pemilu (siwaslu)," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, mengatakan pengawas TPS terlantik akan melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah baik itu kepala dusun, maupun ketua rukun tetangga (RT) di wilayah kerjanya sebelum bertugas.

Sri Hartati mengatakan, tugas pengawasan oleh pengawas TPS mulai dilakukan sejak masa tenang pada 11 Februari, dan dilanjutkan dengan pengawasan terhadap kegiatan sebelum pemungutan suara, sampai pengawasan pada saat penyerahan hasil dari TPS ke panitia pemungutan suara (PPS).

"Pengawas TPS adalah ujung tombak pengawasan pemilu, oleh karena itu harapannya pengawas TPS dapat menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas dan independensi sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa tugas mereka," ujarnya. **(Jdm)-f**

TPST Niten Segera Dioperasionalkan

BANTUL (KR) - Pemkab Bantul mengupayakan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di wilayah Niten Tirtonirmolo Kasihan, segera dioperasionalkan setelah sarana pengolahan sampah tersebut selesai dibangun.

"Yang di Niten kan sudah selesai pembangunan. Mungkin minggu-minggu ini kita coba operasionalkan untuk tahap awal, ibaratnya trial dan nyetel-nyetel apa, pasnya bagaimana," jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Ari Budi Nugroho di Bantul, Selasa (23/1).

Pembangunan TPST di Niten dirancang memiliki kapasitas lima ton perhari, untuk mempercepat penanganan sampah di Bantul, terlebih di beberapa wilayah Bantul, salah satunya di Dingkikan Argodadi sedang proses pembangunan TPST.

"Tapi prinsipnya sudah selesai yang di Niten dan siap untuk dioperasionalkan. Pak Bupati sudah menyampaikan kalau TPST yang akan dibangun di Sedayu tahun ini hanya salah satu bagian untuk menangani sampah yang ada di Kabupaten Bantul," jelasnya.

Ari Budi menyebutkan rencana awal pembangunan TPST di wilayah Niten kapasitasnya masih kecil hingga lima ton perhari, karena dulunya memang prioritas untuk menangani sampah dari Pasar Niten.

"Karena desain kita dulu belum desain desentralisasi, baru desain intinya bagaimana sampah yang ada dikurangi yang ke TPA, sehingga dalam perjalanan waktu kita harus bergerak cepat, sehingga ada konsep TPST," tuturnya.

Lebih lanjut disebutkan, untuk pembangunan TPST di wilayah Dingkikan Argodadi Sedayu, saat ini sudah tahap sosialisasi kepada masyarakat, secara teknis nantinya pembangunan ada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Bantul.

Ari Budi mengatakan ada satu TPST yang saat ini sedang proses pembangunan, yaitu di wilayah Modalan Banguntapan, namun pekerjaan dilakukan dengan anggaran dari pemerintah pusat.

"TPST yang sudah berproses pembangunan ini kan di Modalan, sudah mulai pengerjaan infrastrukturnya dan sudah pembangunan. Cuma kan proses pembangunannya tidak di pemerintah daerah, namun di Kementerian PUPR," ujarnya. **(Zie)-f**

Pelanggaran Masih Terjadi Saat Kampanye

BANTUL (KR) - Bawaslu Bantul memberikan imbauan kepada peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye metode rapat umum mematuhi prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Seperti diketahui kampanye dengan metode rapat umum dilaksanakan sejak tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari mendatang.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul, M Rifqi Nugroho, Senin (22/1), memaparkan Bawaslu Bantul telah menyampaikan imbauan secara tertulis kepada seluruh pimpinan parpol Tingkat Kabupaten Bantul, Tim kampanye daerah capres dan cawapres serta perwakilan calon DPD DIY wilayah Bantul.

Dalam imbauan tersebut disampaikan agar peserta Pemilu dalam melaksanakan rapat umum untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam PKPU No 15 Tahun 2023 tentang kampanye.

"Salah satu penekanannya peserta Pemilu diminta untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian dan selanjutnya kepolisian akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) kepada peserta Pemilu yang bersangkutan," jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peserta Pemilu harus mematuhi ketentuan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU Bantul melalui Keputusan KPU Bantul No 11 Tahun 2024. "Kami berharap dalam rapat umum ini masing-masing peserta Pemilu dapat menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah Bantul," harapnya.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menambahkan dalam kampanye rapat umum ini Bawaslu juga mengingatkan agar peserta pemilu tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam kampanye antara lain dilarang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye rapat umum, dilarang melibatkan unsur TNI/Polri/ASN maupun perangkat kalurahan sebagai peserta kampanye. Selain itu peserta kampanye dalam mengikuti rapat umum juga dilarang menggunakan knalpot brong.

"Hal ini karena pada saat kampanye pertemuan terbatas masih ditemukan adanya anak-anak di lokasi kampanye serta knalpot brong yang dipakai oleh peserta kampanye," ungkapnya. **(Jdm)-f**

BRI Peduli Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem Sungai dan Lingkungan

JAKARTA (KR) - Terus berkontribusi diberbagai bidang, termasuk sosial dan lingkungan, melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli kembali gulirkan program 'Jaga Sungai Jaga Kehidupan'. Lewat kegiatan ini BRI berupaya mendorong perbaikan dan revitalisasi sungai di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama yang tingkat pencemaran airnya sangat tinggi terutama akibat sampah yang menumpuk.

Lewat program ini pula, BRI mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem sungai atau kali bersama-sama, khususnya mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.

Di tahun 2023, program 'Jaga Sungai Jaga Kehidupan' kembali dilakukan dan kali ini di 100 titik sungai atau kali yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Program 'Jaga Sungai Jaga Kehidupan' ini melalui 18 Regional Office BRI seluruh Indonesia dan telah dilakukan sejak 2020. Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan program ini dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi asli sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. "Kami ingin sungai-sungai di negeri ini kembali sebagaimana fungsi asalnya, yakni sebagai ruh kehidupan bagi masyarakat di sekitar sungai. Sungai dapat menjadi penyangga kesehatan, ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang ada," ungkapnya.

Catur menambahkan, banyak terlihat peradaban terbangun dari sungai yang ada dalam suatu wilayah yang menyebabkan masyarakatnya tumbuh dan memberikan kontribusi yang nyata bagi kehidupan mereka. "Untuk itulah BRI hadir mengembalikan ruh sungai sebagai mana mestinya," tegasnya.

Program Jaga Sungai Jaga Kehidupan yang dilaksanakan BRI ini menerapkan konsep Triple Bottom Line, yaitu Pro People, Pro Planet dan Pro Profit. Mengusung semangat Pro Planet dan Pro People, BRI tidak hanya melakukan normalisasi, pembersihan, pengerukan sungai.

BRI juga membangun sejumlah sarana dan prasarana seperti taman, ruang terbuka hijau, dan area ramah anak, serta mengedukasi masyarakat mengenai pemeliharaan aliran sungai yang sehat yang bermanfaat bagi kehidupan. Hal ini sesuai tujuan program tersebut untuk menjaga ekosistem kehidupan di sekitar sungai.

Program ini dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Pasalnya, sampah yang terkumpul dari pembenahan sungai tersebut dipilih dan dipilah, dipisahkan sampah organik dan anorganik atau plastik.

KR-Istimewa

BRI Peduli kembali gulirkan program 'Jaga Sungai Jaga Kehidupan' sebagai upaya mendorong perbaikan dan revitalisasi sungai di sejumlah wilayah Indonesia

Sampah organik yang sudah dipilah bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat seperti bahan pupuk kompos, tambahan pakan ternak, urban farming, bahkan bisa diolah menjadi biogas.

Sedangkan sampah anorganik akan dicacah menggunakan alat pencacah sampah yang BRI sediakan bagi masyarakat. Setelah sampah dicacah, sampah pun dijual kepada pengumpul sampah dan masyarakat pun memperoleh pendapatan.

"Secara bertahap, setelah Pro Planet dan Pro People terwujud, maka manfaat dari pembersihan sungai dan pengelolaan sampah yang benar akan memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar, sehingga Pro Profit dapat direalisasikan," terangnya. "Uang dihasilkan dari penjualan sampah ke depan akan ditabung melalui rekening BRI dan bisa ditarik lewat AgenBRILink, Unit Kerja BRI, maupun jaringan e-channel milik BRI lainnya", sambungnya.

Berbagai Aktivitas di Program Jaga Sungai Jaga Kehidupan

Beberapa aktivitas yang dilakukan lewat program 'Jaga Sungai Jaga Kehidupan' ini meliputi pembersihan sungai atau kali yang melibatkan masyarakat atau warga setempat di sekitar lokasi sungai.

Selain mengajak masyarakat bersih-bersih sungai, BRI juga melakukan edukasi ke masyarakat di sekitar sungai atau kali untuk tidak membuang sampah ke sungai dan pengelolaan sampah. Dalam edukasi lingkungan yang sehat dan pengelolaan sampah kepada masyarakat, BRI bekerja sama dengan bank sampah setempat. Hal ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.

Di saat bersamaan juga dilakukan kegiatan BRI Menanam. Kegiatan ini berupa penanaman kembali atau penghijauan daerah kritis atau lahan kosong di sekitar sungai.

Kegiatan CSR ini juga memberikan penyaluran bantuan sarana dan prasarana untuk kebersihan kali dan sampah, seperti kontainer sampah agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, trash barrier untuk membantu mengendalikan aliran air di sekitar sungai dan mencegah limbah atau sampah masuk ke dalam air, hingga peralatan untuk bank sampah di lokasi setempat. Bantuan diberikan kepada pengurus setempat baik RT maupun RW setempat.

Catur mengungkapkan bahwa melalui program 'Jaga Sungai Jaga Kehidupan' ini, BRI akan terus mendorong perubahan cara pandang masyarakat akan fungsi dan peran sungai dalam kehidupan dan masa depannya. Aliran sungai yang bersih dan tertata tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai mampu memberikan dampak ekonomi dan menggerakan ekonomi masyarakat.

"BRI akan terus mendorong perubahan cara pandang masyarakat akan fungsi dan peran sungai dalam kehidupan dan masa depannya. Aliran sungai yang bersih dan tertata tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai mampu memberikan dampak ekonomi dan menggerakan ekonomi masyarakat," pungkas Catur. **(Sal)**

INDUSTRI RAKYAT PENGOLAHAN IKAN TELAH BERJALAN

Bupati: Antara Hulu Hingga Hilir Terkoneksi

BANTUL (KR) - Industri rakyat pengolahan ikan Siluang Mina Nisa di wilayah Monggang, Kelurahan Srihardono Pundong telah mengolah ikan hasil tangkapan nelayan di daerah tersebut.

"Nelayan menangkap ikan, hasil tangkapannya diolah oleh industri rakyat pengolahan ikan di Kabupaten Bantul, di antaranya adalah di usaha pengolahan ikan Pak Sudarisman ini," jelas Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, usai pembinaan dan pengarahan bagi industri rakyat tersebut di Bantul, Senin (22/1).

Menurutnya, apa yang telah dilakukan di industri pengolahan ikan ini suatu perkembangan yang menggembirakan, karena antara hulu dan hilir sudah mulai ada koneksi dan berjalan bersama-sama.

"Kedepan kita perlu menguatkan hulunya, di mana hasil tangkapan nelayan ini harus kita tingkatkan dengan peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan," tegasnya.

Bupati juga mengatakan kegiatan pengolahan ikan hasil tangkapan nelayan menjadi berbagai makanan yang digemari itu menjadi usaha yang prospektif karena pasarnya itu masih terbuka, tinggal meningkatkan skala usahanya.

"Jadi kita berfikir pasarnya dulu baru produksi. Jangan dibalik, produksi besar-besaran tapi pasarnya nggak ada, dan yang dilakukan di tempat usaha pengolahan ikan ini sudah tepat," ujarnya.

Pemkab Bantul juga ingin terus mengembangkan sektor-sektor potensial, termasuk sektor kelautan dan perikanan di Bantul yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah.

Dengan demikian, Bupati berharap, usaha-usaha perikanan di Kabupaten Bantul akan menemukan pola yang matang dari hulu sampai ke hilir. Dan diharapkan sektor kelautan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah daerah telah membentuk Dinas Perikanan dan Kelautan, karena kita punya keinginan cita-cita bagaimana sektor kelautan di Bantul itu bisa kita kelola untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Bantul," tuturnya.

Namun demikian, Bupati mengingatkan jika sumber daya kemaritiman di Bantul belum tereksplorasi secara maksimal. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kemaritiman di Bantul masih memerlukan pengembangan.

"Pantai kita ini belum tereksplorasi secara maksimal. Sumber daya manusia kemaritiman kita itu masih butuh pengembangan. Kedua sarana dan prasarana ini juga belum memadai," ujarnya. **(Roy)-f**